



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A
SK BAN – PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Implementasi Perda Kota Cimahi No. 18 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Skripsi

Oleh

Dwi Risma Oktariani

2013310069

Bandung

2017



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Implementasi Perda Kota Cimahi No 18. Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Skripsi

Oleh

Dwi Risma Oktariani

2013310069

Pembimbing

Dr. Indraswari

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Dwi Risma Oktariani
Nomor Pokok : 2013310069
Judul : Implementasi Perda Kota Cimahi No. 18 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada 26 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota


Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si


Sekretaris

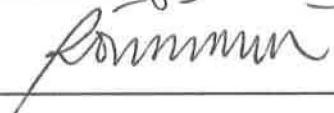
Dr. Indraswari

Anggota

Maria Rosarie Harnie Triastuti, S. IP., M.Si :



: 



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dwi Risma Oktariani
NPM : 2013310069
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi
No 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Juli 2017



Dwi Risma Oktariani

Abstrak

Nama : Dwi Risma Oktariani
NPM : 2013310069
Judul : “Implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi No.18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi terhadap pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Marille S. Grindle.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan yang dilakukan peneliti di DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Perda Kota Cimahi No.18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ditemukan beberapa hambatan sehingga implementasi kebijakan perlindungan anak belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya koordinasi antara aktor pelaksana dan karakteristik lingkungan yang belum mendukung terhadap kebijakan Perda ini.

Kata Kunci : Kebijakan, Penyelenggaraan Perlindungan Anak, DINSOSP2KBP3A

Abstract

Name : Dwi Risma Oktariani
NPM : 2013310069
Title : "The Implementation of Local Regulation Cimahi Number 18 of 2012 about Child Protection"

The purpose of this research is to find out how DINSOSP2KBP3A Cimahi on Implementation of Local Regulation Cimahi City Number 18 Year 2012 on the Realization of Child Protection. This research is using policy implementation theory from Marile S. Grindle.

The research method used is qualitative research methods by using data collection techniques through in-depth interviews and literature study that researchers do in DINSOSP2KBP3A Cimahi.

The results of this research indicate that in the implementation of Cimahi City Regulation Number 18 Year 2012 on Implementation of Child Protection found several obstacles, so that the implementation of child protection policy has not gone well. This is due to several factors such as the lack of coordination between the implementing actors and the environmental characteristics that not supports to the policy implementation of this law.

Keywords : Policy, Implementation of Child Protection, DINSOSP2KBP3A

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi No 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.”**

Skripsi ini merupakan penelitian mengenai implementasi kebijakan perda penyelenggaraan perlindungan anak. Tujuan penulisan ini untuk menjawab keingintahuan penulis bagaimana Pemerintah Kota Cimahi dalam memenuhi dan mendukung tercapainya hak-hak anak. Dalam penulisan penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu dalam menyempurnakan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Mangadar Situmorang, Ph.D, selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr. Pius Sugeng, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Tutik Rachmawati, S.IP., MA., Ph. D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

4. Kristian Widya Wicaksono, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan dan sekaligus dosen wali penulis.
5. Dr. Indraswari, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen pengajar, staf pelaksana, serta seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
7. Bapak Yuyus, Bapak Yudhi, Bapak Dian, Ibu Nia di DINSOSP2KBP3A yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Ibu Risdawati dan Ibu Gantine di LK3 Kota Cimahi yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Riswanto dan Ibu Mia Meirawati yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Suci Rismi, Krisnowo dan Farhan Trirama yang telah membeikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.
11. Clarashinta, yang telah menjadi teman diskusi dan membantu memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ika, Natalia, Hanny dan teman-teman Ilmu Administrasi Publik 2013 yang telah membatu penulis menyelesaikan skripsi ini.

13. Dhita Yola, Puspita, Lucky, Ester, Neng, dan Devi yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Dan semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan, khususnya bagi penulis sendiri dan dapat memberikan informasi kepada siapapun yang membacanya.

Bandung, Juli 2017

Penulis,

Dwi Risma Oktariani

Daftar Isi

Abstrak	i
Abstrack.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran	viii
Daftar Singkatan.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Identifikasi Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Administrasi Publik	10
2.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.3Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	13

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	15
2.5 Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle	21
2.6 Model Penelitian	22
2.7 Operasional Variabel.....	23
2.7.1 Variabel Isi (<i>Content</i>) Kebijakan	23
2.7.2 Variabel Lingkungan (<i>Context</i>) Kebijakan	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Tipe Penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian.....	32
3.3 Sumber Data.....	32
3.4 Prosedur Pengumpulan Data.....	33
3.4.1 Wawancara Mendalam.....	34
3.4.2 Studi Dokumen.....	36
3.5 Analisis Data	37
3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan	37
BAB IV DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	40
4.1 Visi dan Misi DINSOSP2KBP3A.....	40
4.2 Tujuan dan Saran.....	43

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi DINSOSP2KBP3A.....	45
4.4 Struktur Organisasi DINSOSP2KBP3A	46
4.5 Tugas Pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	47
4.5.1 Seksi Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan	51
4.5.2 Seksi Penguatan Kelembagaan, Data, dan Gender	53
4.5.3 Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	55
BAB V PEMBAHASAN	58
5.1 Analisis Hasil Penelitian	58
5.2 Faktor Content.....	59
5.2.1 Kepentingan yang Mempengaruhi	59
5.2.2 Tipe Manfaat	62
5.2.3 Perubahan yang Ingin Dicapai	69
5.2.4 Pengambilan Keputusan.....	74
5.2.5 Pelaksana Program	75
5.2.6 Sumber Daya yang Diarahkan	78
5.3 Faktor Context.....	87
5.3.1 Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat.....	87
5.3.2 Kepatuhan dan Daya Tanggap	91
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	93

6.1 Kesimpulan	94
6.1.1.1 Kepentingan yang Mempengaruhi	94
6.1.1.2 Tipe Manfaat	95
6.1.1.3 Perubahan yang Ingin Dicapai	95
6.1.1.4 Pengambilan Keputusan.....	96
6.1.1.5 Sumber Daya yang Diarahkan	96
6.1.2.1 Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat.....	97
6.1.2.2 Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana.....	97
6.2 Saran.....	97

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Laporan Kasus DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2016-2017 ..	2
Tabel 5.1 Data Kekerasan Perempuan dan Anak	70
Tabel 5.2 Pegawai DINSOSP2KBP3A.....	79
Tabel 5.3 Pengurus Pusat P2TP2A Kota Cimahi Periode Tahun 2013-2017	83
Tabel 5.4 Rencana Program Prioritas Kota Cimahi Tahun 2012-2017	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Menurut Merilee S. Grindlee	20
Gambar 2.2 Model Penelitian	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	45
Gambar 5.1 Proses Rujukan LK3.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 3. Perda Kota Cimahi No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak

Lampiran 4. Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 460/kep.343-BPMPPKB/2013
Tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Kota Cimahi Periode Tahun 2013-2017

Lampiran 5. Panduan Wawancara

Lampiran 6. Kartu Bimbingan

DAFTAR SINGKATAN

DINSOSP2KBP3A: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

FAJIMI : Forum Anak Daerah Kota Cimahi

KDRT: Kekerasan dalam Rumah Tangga

KG: Kesetaraan Gender

LK3: Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Pemkot: Pemerintah Kota

Perda: Peraturan Daerah

PHA: Pemenuhan Hak Anak

PUG: Pengarusutamaan Gender

P2TP2A: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

RPMJD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

SDM: Sumber Daya Manusia

Uu: Undang-undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan salah satu bagian penting dalam kelangsungan hidup bangsa. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹. Anak sebagai aset utama generasi penerus bangsa yang perlu dijaga dan dilindungi.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi².

Perlindungan anak dilakukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu perlindungan terhadap anak dilakukan agar setiap anak mendapatkan perlakuan yang adil sehingga setiap hak anak tidak dirugikan. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

¹ Uu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Uu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Uu No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Faktor yang dijadikan dasar dilakukan perlindungan anak adalah dengan mulai maraknya kejahatan dan masalah-masalah yang menimpa anak ditengah-tengah masyarakat seperti, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Dengan terjadinya masalah-masalah tersebut maka sangat diperlukan penyelesaian melalui tindakan nyata yang dilakukan baik oleh pemerintah, keluarga maupun masyarakat.

Kota Cimahi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang mulai marak terjadi masalah terhadap anak, salah satunya adalah kekerasan terhadap anak. Pemerintah Kota Cimahi mencatat ada 21 kasus kekerasan pada anak dan perempuan periode Januari hingga Juli tahun 2016³ dan total keseluruhan kasus yang terjadi di Kota Cimahi selama tahun 2016 berdasarkan data yang ada adalah berjumlah 26 kasus. Deskripsi daftar laporan kasus tahun 2016 tertera dalam tabel dibawah ini :

³ Oche, 'Kekerasan Anak Marak di Kota Cimahi Mulai Marak', diakses di <http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2016/08/09/kekerasan-anak-marak-di-kota-cimahi-mulai-marak/> diakses pada 26 Mei 2017 Pukul 20.43 WIB.

Tabel 1.1 Daftar Laporan Kasus DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2016⁴

Korban	Usia	Tindak Kekerasan	Deskripsi
DP	27	Fisik	Korban sering mengalami tindak kekerasan yang dilakukan suami korban.
RA	16	Seksual	Korban mengalami tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri.
Y	35	Fisik	Korban sering mendapatkan tindak kekerasan oleh suami yang dilakukan di depan anaknya.
AN	13	Seksual	Korban mengalami tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku.
D	27	Fisik	Tindak kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istri dan anaknya.
AD	8	Seksual	Korban mendapatkan tindak kekerasan seksual dari tetangga korban.
A	32	Fisik	Mengalami tindak kekerasan dan luka fisik.
N	29	Fisik	Mengalami tindak kekerasan fisik.
YM	28	Fisik	Mengalami tindak kekerasan fisik.
G	22	Fisik	Korban mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya dengan kekerasan fisik maupun psikis.
HC	24	Fisik	Mengalami tindak kekerasan fisik.
AA	41	Fisik	Mengalami tindak kekerasan fisik.
ER	26	Fisik	Mengalami tindak kekerasan fisik.
YDP	46	Fisik	Mengalami tindak kekerasan fisik.
SM	13	Seksual	Korban mengalami pelecehan pada saat bermain dan dibujuk pelaku untuk dibawa ke toilet.
RN	29	Fisik	Mengalami tindak kekerasan fisik.
AA	29	Fisik	Perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya dan mendapatkan tindak kekerasan fisik.
RRD	27	KDRT	Mengalami tindak kekerasan fisik.
ES	47	FISIK	Mengalami tindak kekerasan fisik.
FZ	15	FISIK	Korban mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh kakak kelasnya di sekolah berupa goresan benda tajam di kedua pergelangan tangannya.
RANR	9	Seksual	Korban diduga mendapatkan kekerasan seksual dari ayah kandungnya sendiri.
A	29	KDRT	Mengalami tindakan kekerasan fisik.
YG	35	KDRT	Mengalami tindakan kekerasan fisik.
S	25	KDRT	Mengalami tindakan kekerasan fisik.
FH	12	Seksual	Korban mengalami pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh ayah korban sejak korban duduk dibangku kelas 2 SD sampai sekarang.
ES	29	KDRT	Mengalami tindak kekerasan fisik dan psikis.
IMA	33	KDRT	Mengalami tindak kekerasan fisik dan psikis.

⁴ Data yang diolah penulis berdasarkan data yang diperoleh dari DINSOSP2KBP3A.

Berdasarkan data laporan kasus diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus pada tahun 2016, terdapat 20 kasus kekerasan terhadap dan 7 kasus terhadap anak. Kasus terhadap anak tersebut lebih didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Kasus yang terjadi terhadap anak memang masih rendah namun hal ini perlu ditangani secara serius agar tidak terjadi peningkatan pada jumlah kasus yang terjadi.

Pemerintah Kota Cimahi menindaklanjuti masalah tersebut salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yaitu, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.⁵

Dalam hal ini yang menjadi *leading sector* untuk melakukan perlindungan anak di Kota Cimahi dalam mengimplementasikan Perda Kota Cimahi No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak ini menyebutkan bahwa DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi mempunyai kewajiban untuk melakukan atau mengkoordinasikan pencegahan dan melakukan penanganan dengan

⁵ Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

mengkoordinasikan pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan atau laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan melihat adanya kasus terhadap anak di Kota Cimahi dan kewajiban yang dimiliki oleh DINSOSP2KBP3A untuk mengimplementasikan kebijakan ini, maka penulis ingin melihat bagaimana DINSOSP2KBP3A melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan implementasi kebijakan perda penyelenggaraan perlindungan anak, khususnya dalam melakukan dan mengkoordinasikan pencegahan. Penulis ingin melihat keberhasilan kebijakan dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan teori Merille S. Grindle.

Teori ini menilai suatu keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*). Dalam teori ini, Grindle menyebutkan bahwa implementasi dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik, yang didalamnya terdapat berbagai kepentingan. Teori ini dianggap sesuai dan tepat digunakan dalam mengkaji mengenai penyelenggaraan perlindungan anak untuk melihat bagaimana berbagai kepentingan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Grindle pun memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan secara umum, tugas implementasi membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery systems*", di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan

dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan kedalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah ke dalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola. Maksud dari program-program tindakan dan proyek-proyek individual adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.⁶

Dengan menggunakan teori ini, tujuan yang diinginkan dalam pengimplementasian Perda Kota Cimahi No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dirancang melalui program-program, sarana, serta sebuah proyek tepat dijelaskan melalui indikator-indikator yang terdapat dalam variabel-variabel teori implementasi menurut Grindle.

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas dan teori yang dipakai untuk menganalisis, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 dengan judul

“Implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

⁶ B. Winarno, *Kebijakan Publik ; Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Jakarta: CAPS, 2012) 147

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh DINSOSP2KBP3A?

1.3 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan menganalisis masalah diatas dengan menggunakan teori Merille S. Grindle. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni :

1. *Content of Policy* (Isi Kebijakan)
 - a. Kepentingan apa yang mempengaruhi implementasi Perda Kota Cimahi No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?
 - b. Apa manfaat yang diterima baik oleh pemerintah ataupun masyarakat?
 - c. Sejauhmana perubahan yang ingin dicapai dalam implementasi Perda Kota Cimahi No.18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?
 - d. Bagaimana kedudukan implementor dalam pembuat kebijakan?
 - e. Siapa saja pelaksana program yang terlibat?

- f. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai?
2. Lingkungan implementasi (*context of implementation*).
 - a. Bagaimana strategi, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat di dalam kebijakan?
 - b. Bagaimana karakteristik lembaga dan penguasa?
 - c. Bagaimana kepatuhan implementor dalam kebijakan ini?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh DINSOSP2KBP3A.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dapat memberi manfaat dan menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran yang bermanfaat bagi Pemkot Cimahi bahwa penyelenggaraan perlindungan anak memerlukan perhatian lebih.